



BAMBANG SENO BASKORO Kawal Perlindungan bagi Relawan dan Korban Bencana



Kota Yogya Bambang Seno Baskoro pun akan mengawal adanya perlindungan hukum maupun perlindungan sosial bagi para relawan dan korban bencana.

Menurut BSB, sapaan akrabnya, peran relawan dalam penanganan bencana tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka selama ini menunjukkan kinerja tanpa pamrih serta selalu mengedepankan aspek kemanusiaan dalam membantu proses penanganan bencana. Bahkan tanpa harus menunggu diminta, begitu ada informasi terjadi suatu bencana maka para relawan langsung bergerak menuju lokasi. "Tugas mereka mengandung risiko. Makanya begitu ada rencana perlindungan hukum maupun sosial bagi relawan, kami di Komisi C tentu sangat mengapresiasi. Saya pun akan mengawal agar tahun ini bisa direalisasikan," tandasnya.

Rencana perlindungan hukum dan sosial bagi relawan mengemuka dalam rapat koordinasi antara Komisi C

bersama mitra kerja dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan organisasi perangkat daerah lainnya. Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Komisi C itu pun secara khusus membahas penanganan bencana di Kota Yogya. Apalagi pekan kemarin ada kejadian pohon tumbang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Politisi senior dari Partai Golkar ini pun menilai sudah selayaknya para relawan mendapatkan perlindungan hukum maupun perlindungan sosial. Perlindungan hukum, misalnya, akan memberikan kepastian terhadap ketugasan dan kiprah para relawan dalam sumbangsihnya terhadap misi kemanusiaan. Selain adanya pengakuan secara hukum, mereka juga berhak atas apresiasi dari pemerintah.

"Begitu pula dari aspek perlindungan sosial. Para relawan saya kira sepatutnya dikaver oleh BPJS Ketenakerjaan yang difasilitasi oleh pemerintah. Itu bahkan bisa diatur melalui payung hukum," imbuhnya.

Selain relawan, para korban maupun asetnya juga layak mendapatkan perlindungan hukum. Ini, imbuh BSB, supaya ada kepastian serta aturan yang jelas atas bentuk bantuan serta hak bagi para korban. Baik korban yang berada di lahan pribadi maupun persil atau aset milik pemerintah.

"Adanya perlindungan hukum dan sosial harapannya nanti bisa membuat masyarakat tetap merasa aman meski dalam masa siaga darurat bencana," katanya.

(Dhi)-d

KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005